

LAPORAN
TUGAS AKHIR
PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN JASA
BERDASARKAN PSAK NO. 23 TAHUN 2015 PADA PT SURVEYOR
INDONESIA (PERSERO) CABANG SURABAYA

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md.)

Akuntansi



DISUSUN OLEH :

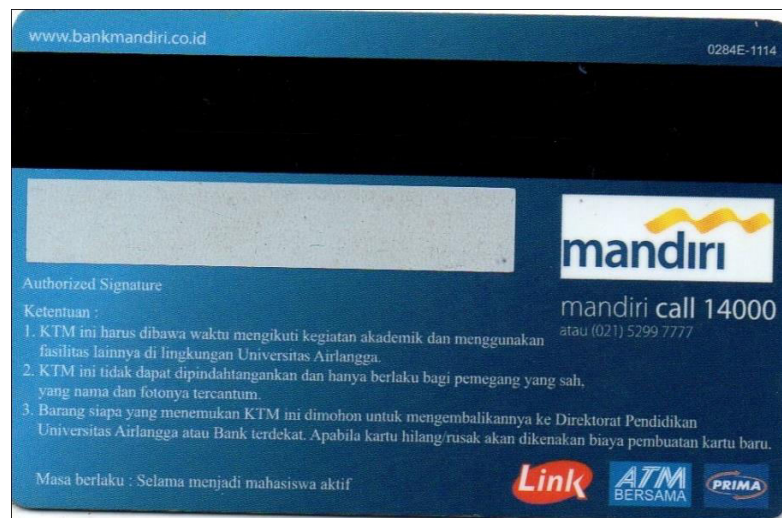
ADIEN YUNITA MAHESWARI

NIM : 151510613113

PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI
DEPARTEMEN BISNIS
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

2018

LEMBAR KARTU TANDA MAHASISWA



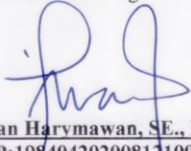
**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN TUGAS AKHIR**

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENGAKUAN PENDAPATAN
JASA BERDASARKAN PSAK NO. 23 TAHUN 2015
PADA PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) CABANG SURABAYA**

Disusun oleh:
Adien Yunita Maheswari
NIM : 151510613113

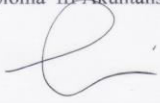
Telah disetujui dan diterima dengan baik,

Dosen Pembimbing


Iman Harymawan, SE., MBA., Ph.D.
NIP: 198404202008121005

Tanggal.....²³/₅ 18

Koordinator Program Studi
Diploma III Akuntansi


Amalia Rizki, SE., M.Si., Ak., CA.
NIP: 197604122003122003

Tanggal.....²⁴/₅ 18

Wakil Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan
PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya



Sinung Slamet Rivanto, SE.
NIP: 7301975

Tanggal.....²²/₅ /20 18

PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Adien Yunita Maheswari
NIM : 151510613113
Program Studi : D III Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Jasa
Berdasarkan PSAK No. 23 Tahun 2015 pada PT
Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya

Menyatakan bahwa bagian atau keseluruhan isi Laporan Tugas Akhir (TA) tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akedemis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan atau ditulis oleh Individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi Laporan Tugas Akhir. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Surabaya, Maret 2018




Adien Yunita Maheswari

NIM : 151510613113

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis limpahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) dengan judul **“LAPORAN TUGAS AKHIR PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN JASA BERDASARKAN PSAK NO. 23 TAHUN 2015 PADA PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) CABANG SURABAYA”**

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis selama pendidikan serta dalam memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam penyelesaian laporan Praktik Kerja Lapangan ini., yaitu kepada:

1. Bapak Dr. H. Widi Hidayat, Msi., Ak., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Ibu Amalia Rizki, SE., Msi, Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Diploma III-Akuntansi yang telah memberikan informasi tentang Praktik Kerja Lapangan.
3. Bapak Iman Harymawan, SE., MBA., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan dan Laporan Tugas Akhir.
4. Bapak Khusnul Prasetyo, S.E., MM., Ak., CMA., CA., selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi dan nasihatnya selama penulis menjalani pendidikan.
5. Seluruh pihak pengajar dan pihak akademik yang turut membantu dan membimbing selama perkuliahan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

6. Bapak Sinung selaku Pembimbing yang telah memberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Surveyor Indonesia (Persero) cabang Surabaya.
7. Pak Gatot, Pak Nurul, Pak Marhen, mas Dharma,, mas Lingga, mas Rengga, mas Yudhis, bu Yanty, bu Mega, mbak Ifa, mbak Anggi, mbak Aries, dan seluruh staff divisi kasum di PT Surveyor Indonesia cabang Surabaya yang telah membimbing penulis saat Praktik Kerja Lapangan dan saat menulis Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.
8. Kepada ibu, bapak dan mama penulis curahkan terimakasih untuk kasih sayang yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tak ternilai, dukungan moril dan materi, serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis. Kalian adalah salah satu motivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi dan menjadi penyemangat dalam segala langkah yang penulis tapaki.
9. Adikku tersayang, Virly Andini terima kasih untuk dukungan morilnya dan terimakasih sudah menjadi alasan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi agar bisa menjadi panutan kedepannya. Semoga kita selalu jadi alasan orang tua dan keluarga besar untuk bahagia.
10. Om Iwan, Om Indra dan Tante Yanty yang selalu menjadi motivator dalam mempertahankan IP dan selalu memberikan pengalaman-pengalaman hidup yang berharga bagi penulis. Terimakasih sudah menjadi paman dan tante sekaligus sosok orang tua bagi penulis. Semoga bahagia selalu.
11. Noven, Febri, dan Wahyu, teman seperjuangan yang selalu ada selama 3 tahun ini dalam suka maupun duka. Kalian penyemangat penulis menjalani masa-masa kuliah. Sukses untuk kita semua. Semoga persahabatan kita tidak berhenti disini.
12. Teruntuk Gledek *Squad*; Afifa, Ainin, Dyah, Nabila, Silvia, Talitha, dan Tita terima kasih telah hadir di dalam perjalanan penulis selama menjalani masa-masa kuliah, *resources* dalam tugas-tugas kuliah

serta kekonyolan kalian yang selalu membuat perjalanan penulis di bangku kuliah ini menjadi berwarna. Sukses selalu untuk kalian.

13. Aulia, Gadis, Nia dan Sjafriana, selaku teman seperjuangan bimbingan dan konsultasi Laporan Tugas Akhir maupun Laporan Praktik Kerja Lapangan, terima kasih atas dukungan moril serta masukan-masukan yang diberikan untuk penulis selama penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan dan Laporan Tugas Akhir.
14. Nuril dan Mbak Rati, teman yang selalu ada disegala kondisi. Terimakasih untuk semua sarannya dan semua pelajaran hidup diberikan. Sukses selalu.
15. Teman-teman AKSO 2015 yang telah memberikan warna warni selama 3 tahun terakhir. Sukses selalu.
16. Serta berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Praktik Kerja Lapangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR KARTU MAHASISWA.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 Landasan Teori.....	4
1.2.1 Definisi Pendapatan.....	4
1.2.2 Jenis-jenis Pendapatan.....	5
1.2.3 Pengakuan Pendapatan.....	5
1.2.4 Metode Pengakuan Pendapatan.....	8
1.2.5 Pengukuran Pendapatan.....	14
1.2.6 Pengungkapan Pendapatan.....	16
1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir.....	17
1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir.....	17

BAB 2.....	19
2.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	19
2.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan.....	22
2.2 Deskripsi Hasil PKL.....	26
2.2.1 Sumber Pendapatan Perusahaan.....	26
2.2.2 Sistem Penjualan Jasa Perusahaan.....	28
2.2.3 Pengakuan Pendapatan pada Perusahaan.....	30
2.2.4 Pengukuran Terhadap Pendapatan.....	33
2.2.5 Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan.....	33
2.3 Pembahasan.....	34
2.3.1 Ilustrasi Jurnal Pendapatan Perusahaan.....	34
2.3.2 Analisa Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan pada Perusahaan.....	36
2.3.3 Analisa Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan.....	41
2.3.4 Ringkasan Permasalahan Akuntansi Pendapatan.....	42
BAB 3.....	46
3.1 Kesimpulan.....	46
3.2 Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3 Ringkasan Permasalahan Akuntansi yang terjadi di PT Surveyor
Indonesia (Persero) Cabang Surabaya.....38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Transaksi Pengakuan Pendapatan.....	7
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Catatan Atas Laporan Keuangan Surveyor Indonesia.....	49
Lampiran 2 Laporan Keuangan Surveyor Indonesia Cabang Surabaya.....	50
Lampiran 3 Laporan Laba Rugi Surveyor Indonesia Cabang Surabaya.....	52
Lampiran 4 Bukti Tanda Terima.....	53
Lampiran 5 Kartu Konsultasi Tugas Akhir dan PKL.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntansi memegang peranan penting dalam ekonomi dan sosial karena setiap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan harus berdasarkan informasi akuntansi. Informasi yang tepat akan membantu pengambilan keputusan yang baik untuk pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan, serta dapat digunakan untuk tujuan lainnya. Informasi keuangan yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan dapat dilihat melalui laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Laporan keuangan yang dihasilkan terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu, serta berisi informasi tentang kinerja perusahaan digunakan untuk menilai dan memprediksi ketidakpastian arus kas masa depan adalah Laporan Laba Rugi Komprehensif. Laporan laba rugi memegang peranan yang sangat penting dan *krusial* karena di dalam laporan laba rugi terdapat pendapatan yang diperoleh perusahaan serta biaya-biaya yang menguranginya, yang kemudian dapat digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tiap periodenya. Mengingat laba merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan.

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari suatu aktivitas yang dilakukannya, kebanyakan aktivitas tersebut adalah aktivitas penjualan produk atau penjualan jasa kepada konsumen. Di dalam pendapatan perlu adanya pengakuan dan pengukuran pendapatan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah sebuah transaksi yang harus diakui oleh perusahaan. Sedangkan pengukuran pendapatan merupakan berapa besar jumlah pendapatan yang harus diakui dari setiap transaksi.

Jika pendapatan yang dihasilkan lebih besar dari biaya yang telah dikeluarkan, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut memperoleh laba. Namun apabila pendapatan yang dihasilkan lebih kecil dari biaya yang telah dikeluarkan, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Kesimpulannya adalah apabila pendapatan yang diakui tidak sama dengan yang seharusnya, berarti pendapatan yang diukur bisa salah dan mengakibatkan informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi tidak tepat sehingga menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus menentukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah pendapatan, apakah pengakuan dan pengukuran pendapatan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang merupakan suatu pedoman dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan bagi pengguna laporan tersebut, khususnya PSAK no. 23 yang menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi perusahaan-perusahaan.

PT Surveyor Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang survei, inspeksi, dan konsultasi, yang salah satu kantor cabangnya terletak di Surabaya. PT Surveyor Indonesia (Persero) memperoleh pendapatan dari pendapatan operasional dan non operasional. Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan dan bersumber pada jasa yang diberikan meliputi pelayanan pemeriksaan teknis, survei, pengkajian, penilaian pengawasan, auditing serta konsultasi. Serta pendapatan non-operasional yang merupakan pendapatan yang dihasilkan dari sumber lain di luar kegiatan utama perusahaan atau kegiatan operasional perusahaan, yang sering disebut sebagai pendapatan lain-lain. Pelayanan jasa ini bertujuan menyediakan jasa dengan mengoptimalkan kekuatannya sebagai *independent assurance*, dengan *taggline* berupa ***Your Trusted Partner for Assurance***.

PT Surveyor Indonesia (Persero) dalam menyelenggarakan jasanya dituntut untuk melakukan hubungan dengan perusahaan lain, misalnya pemerintah, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), serta perusahaan lain yang berkepentingan dengan kegiatan usaha yang ditawarkan. Terkait dengan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, perusahaan akan memperoleh pendapatan dari jasa yg telah terlaksana. Adapun permasalahan-permasalahan akuntansi mengenai pendapatan pada PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya:

1. Kapan pendapatan diakui oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya?
2. Dasar apakah yang digunakan PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya dalam mengakui pendapatannya?
3. Bagaimanakah perlakuan akuntansi atas pelaporan dan pengungkapan pendapatan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya?
4. Bagaimana kesimpulan dan saran yang dapat diberikan untuk PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya?

Permasalahan-permasalah tersebut sesuai dengan masalah utama pendapatan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 yaitu tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan. Masalah lainnya adalah apakah penerapan akuntansi pada pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan pendapatan oleh perusahaan telah tepat. Masalah tersebut menjadi penting karena pada kenyataannya bila perlakuan akuntansi atas pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan pendapatan tidak tepat dapat mempengaruhi laporan keuangan. Keadaan tersebut dapat membuat terjadinya salah penyajian yang pada akhirnya menyebabkan para pengguna informasi keuangan salah dalam mengambil keputusan ekonomi.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Definisi Pendapatan

Pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue* atau penghasilan yang didapat dari penjualan barang atau jasa dari perusahaan ke konsumen, adapun sebutan lainnya yaitu penjualan, pendapatan bunga, dividen, sewa, dan royalti. Istilah pendapatan digunakan untuk menyatakan penghasilan dalam kerangka dasar untuk penyajian dan penyusunan laporan laba rugi perusahaan.

Pendapatan menurut PSAK No. 23 (2015;paragraf 07) “Arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Berdasarkan kutipan diatas, arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima bukan berasal dari pinjaman atau penambahan ekuitas. Dengan demikian jumlah yang dapat ditagih atas nama pihak ketiga, seperti PPN bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas (jumlah kepemilikan perusahaan) dan oleh karena itu harus dikeluarkan dari perkiraan pendapatan. Disisi lain perusahaan yang bergerak di bidang agen tidak diperbolehkan mengakui kas yang masuk sebagai pendapatan, akan tetapi boleh mengakui komisinya sebagai pendapatan. Pendapatan yang diperoleh dapat mengakibatkan aktiva bertambah dan hutang berkurang. Pertambahan pendapatan mengakibatkan pertambahan aktiva dan ekuitas yang bukan berasal dari penanaman modal.

Menurut Skousen, Stice dan Stice (2010;161) juga menjelaskan bahwa Pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas centra yang sedang berlangsung.”

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa mereka menekankan pendapatan pada arus kas masuk atau sebagai penyelesaian kewajiban yang

berasal dari suatu aktivitas yang merupakan suatu kegiatan operasi utama yang berkelanjutan.

1.2.2 Jenis-jenis Pendapatan

1. Pendapatan Operasional

Pendapatan yang timbul dari hasil kegiatan usaha dan operasional perusahaan baik dari penjualan barang dagang maupun penjualan jasa serta kegiatan utama perusahaan lainnya yang termasuk tujuan utama perusahaan tersebut. Pendapatan ini terjadi berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatan usahanya. Setiap perusahaan memiliki jenis pendapatan operasional yang berbeda-beda sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.

2. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan yang dihasilkan dari sumber lain di luar kegiatan utama perusahaan atau kegiatan operasional perusahaan, yang sering disebut sebagai pendapatan lain-lain. Adapun contohnya seperti pendapatan bunga bank, pendapatan sewa, pendapatan yang diperoleh dari penjualan aset tetap maupun dari penjualan surat-surat berharga, dan lainnya.

1.2.3 Pengakuan Pendapatan

Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pada prinsip pengakuan pendapatan (*revenue recognition principle*), umumnya pendapatan diakui pada saat (1) Pendapatan dianggap direalisasikan apabila barang dan jasa, barang dagangan, atau harta lain ditukar dengan kas atau klaim atas kas; Pendapatan dianggap dapat direalisasikan apabila aktiva yang diterima dalam pertukaran segera dapat konversi (siapa ditukar) menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diketahui; dan (2) Pendapatan dianggap dihasilkan (*earned*) apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapat

hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu, yakni apabila proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai.

PSAK No. 23 (2015:14) menjelaskan bahwa pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

1. Entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli;
2. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
3. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
4. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas;
5. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.

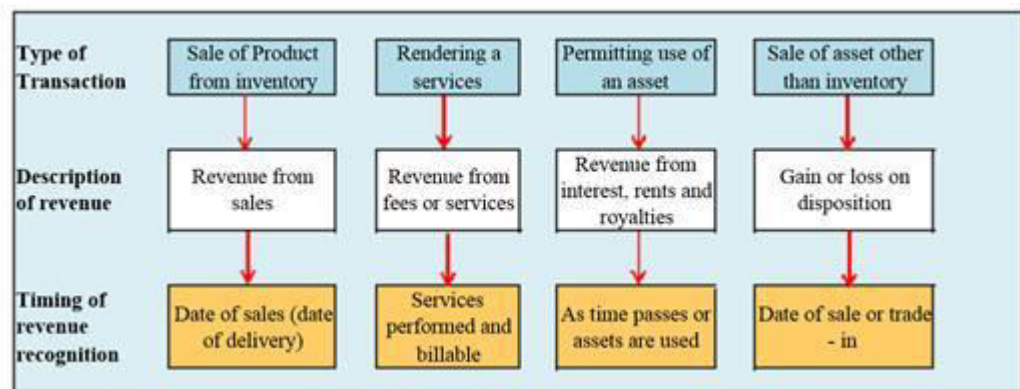
Menurut PSAK No. 23 (2015:20) Jika hasil transaksi penjualan jasa dapat diestimasi secara andal maka penjualan dapat diakui dengan acuan tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode laporan. Dapat diestimasi secara andal jika memenuhi kriteria berikut:

1. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
2. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas;
3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
4. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal.

Menurut Kieso, Warfield dan Weygandt (2014:889) yang ditunjukkan pada gambar 1.1 menjelaskan bahwa ada empat transaksi pengakuan pendapatan yang dapat diakui, yaitu:

1. Pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasanya disebut sebagai tanggal penyerahan pada pelanggan.
2. Pendapatan atas pemberian jasa diakui ketika jasa-jasa tersebut telah dilaksanakan dan dapat ditagih.
3. Pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan *asset* perusahaan seperti pendapatan bunga, sewa, dan royalty diakui sesuai dengan berlakunya waktu atau ketika asset tersebut digunakan.
4. Pendapatan dari pelepasan atau penjualan *asset* selain peroduk diakui pada saat tanggal penjualan.

Gambar 1.1
Transaksi Pengakuan Pendapatan



Sumber: Kieso, Warfield dan Weygandt (2014:889)

Secara umum, ada dua dasar pengakuan pendapatan, yaitu:

1. *Accrual Basis* (Dasar Akrual)

Basis akuntansi yang mengakui transaksi atau aktivitas lainnya pada saat transaksi tersebut terjadi tanpa memperhatikan apakah kas atau setara kas telah diterima atau dibayar. Adapun keuntungannya dalam menerapkan basis ini yaitu pendapatan dan beban diakui saat terjadi transaksi sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya, meskipun kas belum diterima. Namun setiap kelebihan

selalu ada kekurangan dibaliknya, seperti halnya *accrual basis* ini juga memiliki kekurangan yakni adanya resiko pendapatan tak tertagih, dimana nantinya akan mengurangi pendapatan yang semestinya diterima oleh perusahaan, serta perusahaan tidak dapat memperkirakan kapan piutang usaha perusahaan dapat direalisasikan dalam bentuk kas atau setara kas.

2. *Cash Basis* (Dasar Kas)

Basis akuntansi yang mengakui transaksi atau aktivitas lainnya pada saat kas atau setara kas diterima oleh perusahaan yang nantinya akan digunakan sebagai pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. *Cash basis* memiliki kelebihan yaitu pendapatan diakui saat kas diterima oleh perusahaan sehingga mencerminkan posisi yang sebenarnya serta beban operasional yang dikeluarkan belum diakui sampai diterimanya kas, walaupun beban telah terjadi sehingga tidak menyebabkan adanya pengurangan pada pendapatan. Seperti halnya *accrual basis* yang memiliki kekurangan, *cash basis* pun juga memiliki kekurangan yaitu adanya penghapusan piutang secara langsung karena pada dasar akuntansi ini tidak mengenal estimasi piutang tak tertagih, serta manajemen akan susah dalam menentukan kebijakan kedepannya karena selalu berpatokan pada kas. Dasar pengakuan pendapatan ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang umumnya relatif kecil, contohnya UKM, perusahaan retail, praktik dokter, dan lainnya.

1.2.4 Metode Pengakuan Pendapatan

1. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan

Pengakuan pendapatan pada saat penjualan didasarkan pada: (1) Harga jual dapat ditentukan dengan pasti. (2) Berpindahannya produk yang dijual oleh perusahaan ke pelanggan dan telah digantikan dengan suatu *asset* yang lain.

Adapun pencatatan dalam penggunaan metode pendapatan pada saat penjualan adalah sebagai berikut:

- a) Saat terjadi transaksi penjualan kredit

Piutang	xxx	
Penjualan		xxx

- b) Saat terjadi penjualan tunai

Kas	xxx	
Penjualan		xxx

Akan tetapi dalam pelaksanaan pengakuan pendapatan pada saat penjualan, terdapat dua masalah yaitu:

- 1) Penjualan dengan persetujuan pembelian kembali

Apabila perusahaan menjual produknya dan kemudian setuju untuk membelinya kembali dalam periode akuntansi selanjutnya, maka persetujuan pembelian kembali dilakukan pada harga tertentu dan harga tersebut dapat *men-cover* semua biaya persediaan dan penyimpanan yang terkait, sehingga persediaan dan kewajiban yang terkait itu tetap ada di pembukuan penjual, atau dapat dikatakan tidak terjadi penjualan.

- 2) Penjualan dengan hak retur

Terdapat tiga metode pengakuan pendapatan alternative apabila penjual mengalami situasi ini, yaitu:

- Tidak mencatat penjualan hingga habisnya masa berlaku hak retur,
- Mencatat penjualan, tetapi mengurangi penjualan dengan estimasi retur dimasa mendatang, dan

c) Mencatat penjualan dan menghitung retur pada saat terjadinya.

2. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan

Mayoritas pengakuan pendapatan pada saat penjualan digunakan karena sebagian besar ketidakpastian mengenai proses menghasilkan laba dan harga pertukaran sudah diketahui. Akan tetapi, dalam situasi tertentu, pendapatan dapat diakui sebelum penyelesaian dan penyerahan. Hal itu terjadi karena penjual dapat menagih pembeli dalam selang waktu tertentu, ketika ada tahap tertentu dalam proyek telah tercapai. Contoh yang paling terkenal adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang yang menggunakan metode persentase penyelesaian.

Ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang yang diakui oleh profesi akuntansi :

1) Metode Persentase Penyelesaian

Menurut Kieso, Warfield dan Weygant (2014:915) masalah besar dalam menerapkan metode persentase penyelesaian berkaitan dengan kemampuan untuk membuat perkiraan penyelesaian yang cukup akurat dan keuntungan akhir tahun. Pendapatan diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu persentase penyelesaian. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat penyelesaian kegiatan jasa dan kinerja dalam suatu periode. Hal tersebut sesuai dengan PSAK No. 23 (2015: paragraf 21) yang menjelaskan bahwa metode presentase penyelesaian mengakui pendapatan dan laba kotor berdasarkan kemajuan proses konstruksi. Metode ini dapat dilakukan apabila penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal dan memenuhi syarat-syarat berikut : (1) Kontrak itu secara jelas menetapkan hak-hak yang dapat dipaksakan pemberlakuannya mengenai barang atau jasa yang diberikan

dan diterima oleh pihak yang terlibat dalam kontrak, imbalan yang akan dipertukarkan, serta cara dan cara penyelesaian; (2) Pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi semua kewajiban dalam kontrak; dan (3) Kontraktor dapat diharapkan untuk melaksanakan kewajiban kontraktual tersebut.

Dengan dipenuhinya syarat-syarat diatas maka diharapkan perusahaan dapat mengestimasi pendapatan dan bebannya secara andal.

2) Metode Kontrak Selesai

Dalam metode ini pendapatan diakui jika pekerjaan sudah selesai 100%. Semua biaya selama pelaksanaan dalam pekerjaan. Tagihan atas kemajuan tidak dicatat sebagaimana pendapatan, tetapi diakumulasikan dalam akun kontrak persediaan. Metode kontrak selesai harus digunakan jika:

- a. Suatu entitas terutama mempunyai kontrak jangka pendek.
- b. Syarat-syarat untuk menggunakan metode persentase penyelesaian tidak dapat dipenuhi.
- c. Terdapat bahaya dalam kontrak itu di luar resiko bisnis yang normal dan berulang.

Adapun kelebihan dari metode kontrak selesai yaitu pelaporan pendapatan didasarkan pada hasil akhir dan bukan pada taksiran pekerjaan yang belum dilakukan. Kekurangan turut serta menyertai metode kontrak selesai yakni tidak mencerminkan prestasi kerja masa berjalan apabila kontrak tersebut diperpanjang menjadi lebih dari satu periode akuntansi, artinya bahwa pendapatan belum akan dilaporkan sampai tingkat pekerjaan terselesaikan, meskipun pekerjaan yang dilakukan ada pada beberapa

periode akuntansi. Sehingga tidak dapat memberi gambaran yang bisa mewakili kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, para pengguna laporan keuangan lebih memilih menggunakan metode persentase penyelesaian (metode yang sebelumnya) bila pendapatan bisa diestimasi.

3. Pengakuan pendapatan setelah penyerahan

Dalam beberapa kasus, hasil penagihan atas harga jual tidak dapat dipastika secara layak sehingga pengakuan pendapatan akan ditangguhkan. Salah satu dari dua metode ini biasanya dipakai untuk menangguhkan pengakuan pendapatan sampai kas diterima, yaitu Metode Penjualan Cicilan atau Metode Pemulihan Biaya. Dalam beberapa situasi kas diterima sebelum penyerahan atau pengalihan property dan dicatat sebagai simpanan karena transaksi penjualan itu belum selesai. Cara ini disebut sebagai Metode Simpanan.

1) Metode Penjualan Cicilan

Metode Penjualan Cicilan mengakui laba periode periode diterimanya hasil penagihan dan bukan dalam periode penjualan. Metode ini juga dibenarkan atas dasar bahwa bila tidak ada pendekatan yang layak untuk mengestimasi tingkat ketertagihan, maka pendapatan tidak boleh diakui sampai kas diterima atau berhasil ditagih.

Menurut metode ini, pengakuan laba ditangguhkan sampai periode penagihan kas. Baik pendapatan maupun harga pokok penjualan sampai periode ditagihnya kas. Jadi, bukan penjualan yang ditangguhkan sampai periode penagihan yang diantisipasi di masa datang dan kemudian biaya serta beban yang terkait ditangguhkan, melainkan hanya proporsi laba kotor yang ditangguhkan.

2) Metode Pemulihan Biaya

Menurut metode pemulihan biaya, tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok barang yang dijual oleh penjual. Sesudah semua biaya dipulihkan penjual, setiap tambahan kas yang tertagih dimasukkan dalam laba. Laporan laba rugi penjual untuk periode penjualan melaporkan pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor, baik jumlah yang diakui periode berjalan maupun jumlah yang ditangguhkan. Laba kotor yang ditangguhkan dikurangkan dari piutang terkait, dikurangi penagihan di neraca. Laporan laba rugi selanjutnya akan melaporkan laba kotor sebagai pos pendapatan terpisah apabila diakui saat dihasilkan.

3) Metode Simpanan

Menurut metode simpanan, penjual melaporkan kas yang diterima dari pembeli sebagai uang tanggungan atas kontrak dan mengklasifikasikannya sebagai kewajiban (simpanan yang dapat dikembalikan atau uang muka pelanggan) di neraca. Penjual terus melaporkan propertinya sebagai aktiva dalam neraca, beserta setiap hutang terkait yang masih ada. Selain itu, penjual juga terus mencatat beban penyusutan sebagai biaya periode untuk property tersebut. Tidak ada pendapatan atau laba yang harus diakui sampai penjualan selesai. Pada saat itu, akun simpanan ditutup dan salah satu metode pengakuan pendapatan diterapkan dalam penjualan tersebut.

4. Pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus

1) Waralaba

Perusahaan waralaba memperoleh pendapatan dari sumber-sumber berikut, yaitu : (1) dari penjualan waralaba awal dan aktiva atas jasa terakit; dan (2) dari iuran (fee) berkesinambungan yang didasarkan pada pengoperasian waralaba. Franchisor adalah pihak yang memberikan hak bisnis dalam waralaba, dan franchisee adalah pihak yang megoperasikan bisnis

waralaba. Dalam perjanjian waralaba iuran awal dicatat sebagai pendapatan hanya bila dan ketika franchisor melaksanakan pelaksanaan substansial jasa yang wajib ia laksanakan dan penagihan iuran dapat dipastikan secara layak. Iuran waralaba yang berkesinambungan diakui sebagai pendapatan saat dihasilkan dan dapat ditagih dari franchisee.

2) Konsinyasi

Dalam perjanjian konsinyasi, *Consignor* (pabrik) mengirim barang dagang kepada *Consignee* (*dealer*) yang bertindak sebagai agen yang menerima barang dagang dan setuju untuk menjual dan menjaga barang tersebut. Kas yang diterima dari pelanggan dikirim kepada consignor setelah dikurangi komisi penjualan dan semua beban yang dapat dikenakan. Pendapatan hanya diakui setelah consignor menerima pemberitahuan penjualan dan pengiriman kas dari consignee.

1.2.5 Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang tercantum sebagai berikut:

1. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima (PSAK 23:2015:paragraf 09).
2. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dengan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon usaha dan rabat volume yang diperoleh oleh entitas (PSAK 23:2015: paragraf 10).
3. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima. Akan tetapi, jika arus kas masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang

dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima. Sebagai contoh entitas dapat memberikan kredit bebas bunga kepada pembeli atau menerima wesel tagih dari pembeli dengan suku bunga dibawah pasar sebagai imbalan dari penjual barang. Jika perjanjian tersebut secara efektif merupakan transaksi keuangan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan suku bunga tersirat (imputed). Suku bunga tersirat yang digunakan adalah yang lebih jelas ditentukan antara:

- a) Suku bunga yang berlaku bagi instrumen serupa penerbit dengan penilaian kredit yang sama; atau
 - b) Suku bunga yang mendiskonto nilai nominal dari imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga sesuai dengan paragraf 29 dan 30 dan sesuai dengan PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* (PSAK 23:2015:paragraf 11).
4. Jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertuaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Hal ini sering terjadi pada komoditas seperti minyak atau susu ketika penyalur dalam suatu lokasi tertentu. Jika barang dijual atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang dialihkan. Jika nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima tidak dapat diukur secara andal, maka pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang dialihkan (PSAK 23:2015:paragraf 12).

1.2.6 Pengungkapan Pendapatan

Pendapatan yang diperoleh selama satu periode harus disajikan dalam laporan laba rugi untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan selama periode tersebut. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan dan beban perusahaan selama periode tertentu. Adapun prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan adalah:

1. Bagian awal menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan, diikuti dengan harga pokok barang atau jasa yang dijual sehingga diperoleh laba kotor.
2. Bagian kedua menunjukkan beban-beban operasional yang terdiri dari beban usaha dan administrasi.
3. Bagian ketiga menunjukkan pendapatan non-operasional diikuti oleh beban non-operasional.
4. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidental, sehingga diperoleh laba sebelum pajak.
5. Bagian terakhir, laba atau rugi tersebut dikurangi pajak penghasilan sebesar 10% sehingga diperoleh laba atau rugi bersih perusahaan.

Laporan laba rugi sangat berguna bagi investor sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi, bagi kreditur sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Bagi pihak intern perusahaan, laporan laba rugi akan digunakan sebagai pengukur tingkat prestasi kerja. Sehingga apabila terjadi penyimpangan dari yang diharapkan dapat dilakukan perbaikan.

Dalam hal pendapatan, pengungkapan pendapatan haruslah tepat karena pengungkapan pendapatan dapat mempengaruhi laporan keuangan yang dihasilkan manajemen, dimana nantinya laporan keuangan tersebut dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi di masa yang akan datang. PSAK No. 23 (2015:paragraf 35) menegaskan bahwa entitas harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa.
2. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari:
 - a. Penjualan barang
 - b. Penjualan jasa
 - c. Bunga
 - d. Dividen
 - e. Royalti, dan
3. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan.

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah.

1. Memenuhi salah satu syarat kelulusan program Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Menjelaskan perlakuan akuntansi atas pendapatan jasa berdasarkan PSAK No. 23 Tahun 2015 pada PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya.
3. Mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pada PSAK No. 23 Tahun 2015 dengan perlakuan akuntansi atas pendapatan pada PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya.

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

1. Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman mengenai perlakuan akuntansi atas pendapatan pada PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya,

2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

Diharapkan dapat menjadi acuan penulisan tugas akhir serta sarana pembelajaran di masa yang akan datang, khususnya dalam bidang perlakuan akuntansi atas pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan pendapatan pada PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya.

3. Bagi PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya

Sebagai masukan dalam upaya perbaikan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian serta pelaporan pendapatan pada PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya yang mana dapat meningkatkan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan upaya manajemen perusahaan untuk menjadi perusahaan *Independent Assurance* kelas dunia.

4. Bagi Pembaca

Sebagai acuan literatur untuk membantu penulisan Laporan Tugas Akhir, khususnya dalam perlakuan akuntansi atas pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan pendapatan berdasarkan PSAK No. 23 Tahun 2015.

BAB 2

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT Surveyor Indonesia (Persero) atau lebih dikenal dengan PTSI, didirikan pada tanggal 1 Agustus 1991 sebagai suatu badan usaha bersama antara PT Sucofindo (Persero) (kepemilikan 4,48%), Pemerintah Republik Indonesia (kepemilikan 85,12%) dan *Societe Generale de Surveillance, SA (SGS)* (kepemilikan 10,40%).

PT Sucofindo (Persero) selaku pemilik saham atas PT Suveyor Indonesia (Persero) merupakan perusahaan inspeksi pertama yang ada di Indonesia yang berdiripada 22 Oktober 1956 sebagai suatu badan usaha bersama antara Pemerintah Republik Indonesia (kepemilikan 95%), dan *Societe Generale de Surveillance, SA (SGS)* (kepemilikan 5%). Bisnis PT Sucofindo (Persero) bermula dari kegiatan perdagangan terutama komoditas pertanian, dan kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor-impor. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha, PT Sucofindo (Persero) melakukan langkah kreatif dan penawaran inovasi jasa-jasa baru berbasis kompetensinya. Bisnis jasa pertama yang dimiliki adalah cargo superintendence dan inspeksi. Kemudian melalui studi analisis dan inovasi, PT Sucofindo (Persero) melakukan diversifikasi jasa sehingga lahirnya jasa-jasa *warehousing* dan *forwarding*, *analytical laboratories*, *industrial and marine engineering*, dan *fumigation and industrial hygiene*.

Pada bulan Februari 2013, kementerian BUMN selaku pemegang saham terbesar di kedua perusahaan jasa inspeksi tersebut berencana melakukan *merger* atau penggabungan usaha antara PT Sucofindo (Persero) dengan PT Surveyor Indonesia (Persero) yang nantinya akan diberi nama PT Surfindo (Persero), dimana memang dipersiapkan untuk menghadapi pasar terbuka ASEAN di tahun 2015, serta ditujukan untuk peningkatan pangsa pasar di luar Indonesia. Namun pada Februari 2016, rencana tersebut dinyatakan batal. Adapun alasannya

dikarenakan BUMN lebih berfokus pada pembentukan Holding jasa inspeksi dan sertifikasi daripada penggabungan perusahaan. Tujuan pembentukan Holding tersebut untuk meningkatkan peran BUMN pada sektor survei dan sertifikasi di Indonesia. Dikarenakan banyaknya pemain asing yang bergerak disektor sertifikasi di Indonesia, membuat pembentukan Holding Sertifikasi sangatlah penting bagi kelanjutan perusahaan BUMN.

Societe Generale de Surveillance SA (SGS) yang merupakan perusahaan inspeksi, verifikasi, pengujian dan sertifikasi terbesar di dunia yang berpusat di Jenewa, Swiss. Didirikan pada tahun 1878, SGS telah diakui sebagai patokan global untuk kualitas dan integritas. Perusahaan ini telah terdaftar di Jenewa sebagai *Société Générale de Surveillance* pada tahun 1919.

Pada awalnya PT Surveyor Indonesia (Persero) didirikan untuk membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam memperlancar aliran barang modal dan peralatan dari seluruh dunia ke Indonesia melalui jasa pemeriksaan pra-pengapalan yang bertaraf internasional. Sebelum adanya PT Surveyor Indonesia (Persero), pemeriksaan barang impor yang masuk ke Indonesia dilakukan oleh Bea Cukai untuk menetapkan besarnya bea masuk yang harus dibayar importir. Namun pemeriksaan oleh Bea Cukai mendapat keluhan dari para importir karena pemeriksaan yang dilakukan menghabiskan waktu yang lama, tidak profesional, dan biaya yang tinggi. Keluhan-keluhan inilah yang menjadi hambatan bagi para importir. Sebagai upaya mengatasi keluhan-keluhan tersebut, pemerintah membentuk PT Surveyor Indonesia (Persero) untuk melakukan *Pre-Shipment Inspection* (PSI) yang bertujuan membantu Bea Cukai selama pengembangan Electronic Data Interchange (EDI). EDI adalah alat untuk memonitor barang-barang di dalam kontainer dengan waktu dan biaya yang lebih efisien, yang diperlukan Bea Cukai dalam melakukan pemeriksaan barang-barang impor.

Pre-Shipment Inspection yang dijalankan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) merupakan kegiatan inspeksi barang-barang impor di negeri asal sebelum barang tersebut dikirimkan ke Indonesia, sehingga saat barang-barang

tersebut sampai ke Indonesia, Bea Cukai cukup memeriksa laporan PT Suveyor Indonesia (Persero) dan menetapkan bea masuk. Proses ini terbukti lebih efektif dan efisien dibandingkan proses selanjutnya. Kemudian sejak bulan April 1997, PT Surveyor Indonesia (Persero) merumuskan misi sebagai jasa survei dalam arti yang luas.

PT Surveyor Indonesia (Persero) pusat terletak di Graha Surveyor Indonesia Lt. 4-11 Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta, Indonesia. Memiliki 11 kantor cabang dalam negeri serta 1 kantor cabang luar negeri. Adapun cabang dalam negerinya terletak di Surabaya, Semarang, Balikpapan, Banjar baru, Batam, Banda Aceh, Makassar, Padang, Palembang, Pekanbaru, dan Jakarta. Serta 1 kantor cabang di luar negeri yang terletak di Singapura. Per 31 Desember 2016, karyawan tetap yang tercatat sebanyak 1.581 orang. PT Surveyor Indonesia (Persero) sejak berdiri hingga sampai saat ini tidak pernah melakukan pergantian nama, yaitu PT Surveyor Indonesia (Persero). Pada kesempatan ini, penulis diberi kesempatan untuk Praktik Kerja Lapangan di PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya, yang terletak di Jl. Comal No. 7-9 Surabaya.

Memiliki visi untuk menjadi Perusahaan *Independent Assurance* kelas dunia bukanlah hal yang tidak mungkin. *Independent Assurance* sendiri memiliki arti sebuah *independent* yang mampu memberikan jaminan untuk tidak memihak kepada siapapun disetiap transaksi yang terjadi. Layanan *Independent Assurance* difokuskan pada 5 sektor yaitu industri dan perdagangan; energi dan sumber daya mineral; kehutanan; kelautan; dan lingkungan hidup. Kompetensi dalam 5 sektor tersebut mencakup 6 bidang pelayanan jasa, yaitu industri dan fasilitas; Pemerintah dan institusi; sertifikasi keselamatan dan jasa umum; migas dan petrokimia, mineral dan batu bara; serta energi dan sistem pembangkit listrik.

Untuk mencapai visi tersebut perlu misi yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) untuk mendorong tercapainya visi yang dituju. Adapun misinya yaitu memberikan arahan kepada pelanggan agar terdorongnya daya

saing global; Pemerintah dan perusahaan swasta merupakan mitra strategis yang dituju untuk pemanfaatan sumber daya dan produk dalam negeri khususnya pada bidang infrastruktur, kemaritiman dan ketahanan pangan; Serta menyediakan sumber daya manusia yang handal dalam bidangnya yang berkompetensi nasional ataupun internasional serta penggunaan teknologi *modern* untuk memenuhi tuntutan pasar.

Demi merealisasikan misinya, khususnya dalam hal penyediaan sumber daya manusia yang handal dan berkompetensi nasional ataupun internasional, PT Surveyor Indonesia (Persero) perlu menanamkan nilai-nilai budaya perusahaan kepada setiap karyawannya. Adapun nilai-nilai budaya perusahaan yang telah disepakati dan dianut oleh seluruh karyawan perusahaan adalah K-I-K-I. Penjabaran dari KIKI tersebut yaitu, **Kompetensi**, karyawan diharuskan memiliki keahlian, pengetahuan, perilaku dan sikap untuk melaksanakan pekerjaan yang memuaskan. **Inovasi**, karyawan juga dituntut untuk menghasilkan cara yang cepat, tepat dan akurat dalam bekerja. **Kepedulian**, karyawan harus menanamkan rasa peduli serta sikap yang membantu disegala kondisi. Serta **Integritas**, yaitu karyawan harus melakukan tindakan jujur dimana mengatakan hal yang memang seharusnya dikatakan dengan tidak memihak siapapun. Dapat dilihat bahwa PT Surveyor Indonesia (Persero) tidak hanya menanamkan nilai *hardskill* pada karyawannya namun juga *softskill*. Apabila nilai-nilai budaya perusahaan sudah terpatrit di setiap karyawannya, maka visi PT Surveyor Indonesia (Persero) menjadi perusahaan *Independent Assurance* kelas dunia akan lebih mudah untuk digenggam.

2.2.1 Struktur Organisasi Perusahaan

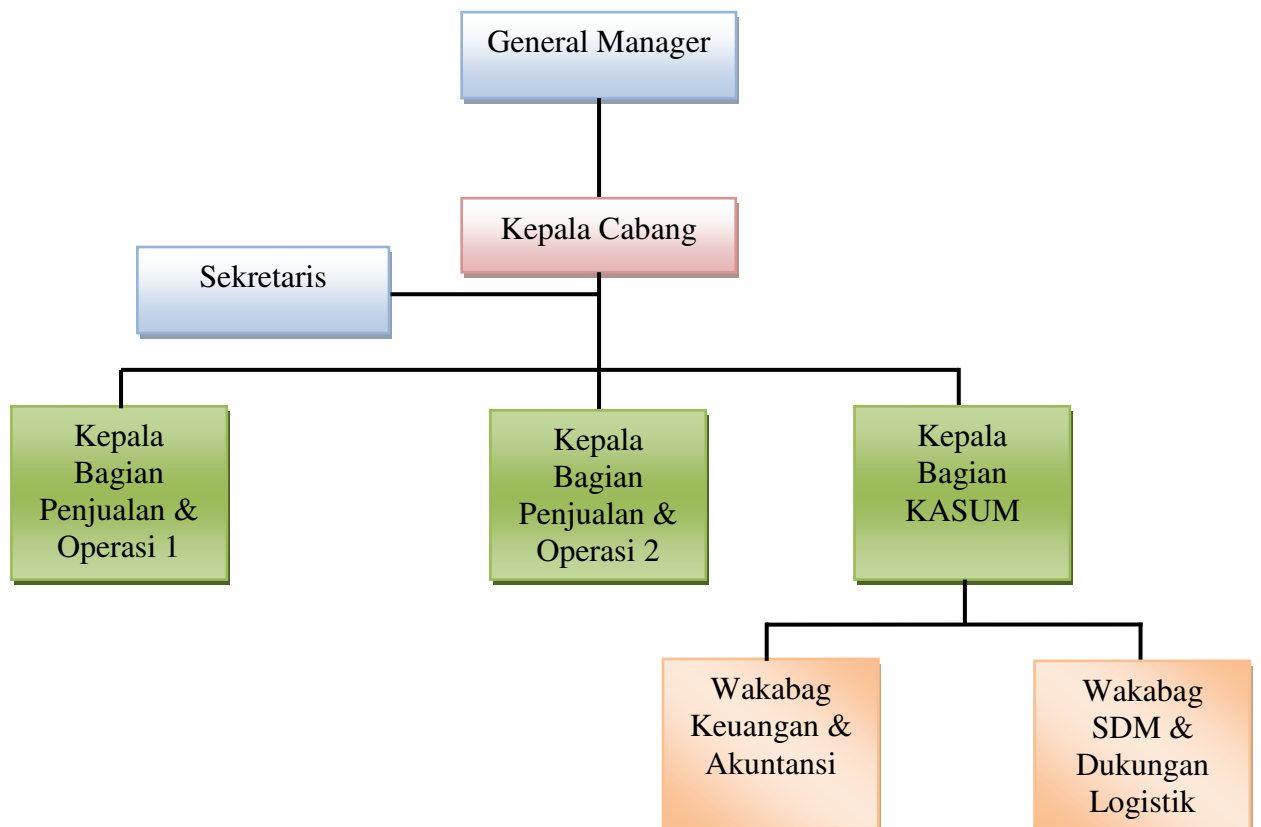
Untuk mempermudah pembagian wewenang antara divisi satu dengan lainnya, maka diperlukan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antaramtiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Adapun gambar struktur organisasi PT Surveyor Indonesia (Persero) cabang Surabaya sebagai berikut.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi

PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) CABANG SURABAYA



Sumber: Dokumen Internal Perusahaan

Bagan struktur organisasi PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya disajikan pada gambar 2.1. Adapun uraian pembagian tugas dan wewenang masing-masing bagian di PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya sebagai berikut:

1. General Manager

General Manager berfungsi sebagai pemimpin utama perusahaan dalam pengambilan keputusan dan penanggungjawab utama atas jalannya dan tercapainya tujuan perusahaan serta mengkoordinasikan para direktur agar tercapainya pelaksanaan operasional perusahaan secara teratur, terarah, terkendali, dan terpadu.

2. Kepala Cabang

Kepala Cabang merupakan pimpinan PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut:

- a) Memimpin perusahaan secara keseluruhan, menerapkan peraturan, kebijakan serta keputusan-keputusan yang ada.
- b) Melaksanakan segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh General Manager serta melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat bagi Kepala Cabang.
- c) Mengambil tindakan atas sesuatu penyimpangan yang terjadi di perusahaan, dan bertanggung jawab kepada kantor pusat.

3. Sekretaris

- a) Menerima surat masuk untuk perusahaan untuk kepentingan perusahaan serta mengelola surat masuk dan keluar.

4. Kepala Bagian Penjualan dan Operasi 1

- a) Melaksanakan segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Cabang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang.
- b) Mengatur kelancaran operasi perusahaan, khususnya bidang dibawahnya seperti kegiatan survey, kegiatan analisa laboratorium dan kegiatan administrasi pelaporan.
- c) Menerapkan segala peraturan, kebijakan dan menerapkan keputusan yang telah diambil.

5. Kepala Bagian Penjualan dan Operasi 2

- a) Bertugas untuk mencari peluang untuk memperluas pemasaran produk dan jasa perusahaan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
6. Kepala Bagian Keuangan, Akuntansi, SDM, dan Umum (KASUM)
 - b) Melaksanakan semua kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Cabang.
 - c) Mewakili kepala cabang dalam administrasi umum.
 - d) Mengatur kelancaran operasi perusahaan, khususnya bidang dibawahnya seperti kegiatan akuntansi, keuangan, SDM, dan umum.
 - e) Menetapkan segala peraturan, kebijakan, dan menerapkan keputusan-keputusan yang diambil.
 7. Wakil Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan
 - a) Menyelenggarakan pencatatan akuntansi secara keseluruhan.
 - b) Mempersiapkan laporan keuangan perusahaan.
 - c) Melakukan analisa atas biaya-biaya perusahaan, baik penerimaan maupun pengeluaran perusahaan.
 - d) Mempersiapkan berbagai bukti pembukuan yang akan digunakan dalam berbagai transaksi perusahaan.
 - e) Melaksanakan dan mengelola kegiatan anggaran perusahaan meliputi; penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), revisi pedoman anggaran serta mengendalikan anggaran serta pengawasan investasi.
 - f) Melaksanakan dan mengelola kegiatan dalam hal perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, serta pelaporan yang akurat dan termutakhir.
 8. Wakil Kepala Bagian SDM, Umum dan Dukungan Logistik
 - a) Mengelola kebijakan, panduan, pedoman dan ketentuan yang berkaitan dengan staffing (penarikan, seleksi, penempatan pegawai), pemeliharaan, pengembangan dan pembinaan (remunerasi/kompensasi, karir, pengembangan, kompetensi, hubungan industrial, administrasi kepegawaian) dan pengakhiran

(terminasi) serta memastikan pemahaman dan kepatuhan penerapannya di seluruh jajaran perusahaan.

- b) Merekrut, menyeleksi, melakukan orientasi dan menempatkan pegawai sesuai dengan perencanaan SDM perusahaan.
- c) Mengelola pengembangan dan upaya mempertahankan pegawai dengan mengembangkan sistem imbal jasa dan *punishment yang fair*, merancang sistem manajemen kinerja (termasuk sistem penilaian kinerja, metode *coaching & counseling*), sistem perencanaan karir dan penetapan kebijakan dan sasaran pelatihan yang terpadu.
- d) Mengelola program kaderisasi dan pembinaan karir pegawai melalui penempatan pegawai (promosi/demosi, dan mutasi), dan pemberhentian (PHK dan pensiun).
- e) Pengelolaan hubungan antar pegawai menyangkut pembinaan rohani, jasmani, serta hubungan dengan serikat pekerja dan instansi terkait.

2.2 Deskripsi Hasil PKL

2.2.1 Sumber Pendapatan PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya

PT Surveyor Indonesia Cabang Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Aktivitas perusahaan menghasilkan pendapatan jasa yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan dalam penyediaan jasa-jasa, antara lain:

1. Jasa *Technical Inspection Survey*

Jasa yang merupakan inspeksi, testing dan survey yang berbasis teknis. Misal, *Inspection of Platform* yakni inspeksi mutu suatu logam misalnya baja pada kerangka kapal. Ini dilakukan dengan meneliti

kepadatan dan memastikan tidak ada celah didalamnya yang bertujuan untuk keamanan.

2. *Jasa Apresiasi Domestik Produk*

Jasa ini muncul karena adanya ketentuan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti tender pengadaan pada perusahaan-perusahaan perminyakan dan gas bumi di Indonesia. Misal, PT Pertamina (Persero) akan melakukan tender pengadaan alat-alat pengeboran minyak, maka perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti tender tersebut harus diperiksa, apakah produk yang dihasilkan sesuai dengan kualifikasi tender yang ada. Tugas PT Surveyor Indonesia (Persero) yakni menyaksikan secara langsung apakah perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender benar-benar mampu menghasilkan produk dengan jumlah dan kualitas tertentu sesuai dengan ketentuan dari PT Pertamina.

3. *Jasa Quality, Environment, and Safety*

Contoh : Jasa Konsultasi Manajemen Mutu, merupakan jasa dari PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya dengan membantu menyiapkan perusahaan klien untuk mendapatkan ISO 9000. ISO 9000 merupakan kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional yang berfokus pada bidang standarisasi.

4. *Jasa Economical Inspection Survey*

Merupakan jasa inspeksi dan survey berbasis nilai ekonomi.

Contoh : Studi Optimalisasi Wilayah, memberikan jasa survey dengan meneliti potensi-potensi apa yang sebaiknya dikembangkan pada suatu wilayah.

Pendapatan operasional diatas dilakukan dengan menggunakan perjanjian kontrak. Pekerjaan jasa memiliki jangka waktu penyelesaian yang berbeda-beda antara 1 minggu sampai dengan 7 bulan atau lebih.

b. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional merupakan pendapatan lain-lain yang diterima bukan dari aktivitas utama operasi perusahaan, antara lain:

1. Pendapatan atas selisih kurs.
2. Pendapatan bunga atas jasa giro bank.

Untuk pendapatan atas selisih kurs, sesuai Peraturan BI No. 17/3/PBI/2015, yang ditetapkan pada tanggal 1 April 2015 menegaskan bahwa seluruh transaksi harus menggunakan mata uang rupiah. Dimana memang peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pengukuran pendapatan PT Surveyor Indonesia (Persero) telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan mengharuskan perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan nilai rupiah. Apabila transaksi yang terjadi menggunakan mata uang asing, maka akan disesuaikan dengan kurs pajak yang berlaku.

2.2.2 Sistem Penjualan Jasa Perusahaan

- a. Penjualan jasa dapat terjadi dengan (1) memberikan penawaran-penawaran terhadap suatu perusahaan maupun pemerintah daerah, (2) Mengikuti tender-tender suatu pekerjaan jasa, (3) Mendapatkan permintaan langsung dari klien.
- b. Apabila persetujuan penjualan jasa telah didapatkan, kemudian disusunlah suatu perjanjian kontrak atas pekerjaan yang dilakukan yang didalamnya berisi besarnya pembayaran atas jasa yang dilakukan, lama waktu pengerjaan, imbalan yang akan diberikan setelah pekerjaan selesai, serta kapan tahapan pembayaran.

Adapun metode pembayarannya dilakukan sebagai berikut, yaitu untuk pembayaran awal klien diminta untuk membayar 50% dari nilai kontrak yang dibayar saat menandatangani perjanjian kontrak dan sisanya 50% ditambah PPN 10% dibayarkan setelah pekerjaan dalam kontrak 100% telah selesai.

Perusahaan akan mencatat masing-masing pembayaran itu pada tiap-tiap penerimaan pembayaran.

Jurnal yang digunakan perusahaan adalah sebagai berikut:

- *Pada saat pembayaran tahap pertama:*

Kas/Bank	Rp	xxx		
Penerimaan Uang Muka Langgan			Rp	xxx

- *Pada saat pembayaran tahap kedua (ketika pelanggan mampu membayar tunai sisa pembayarannya):*

Penerimaan Uang Muka Langgan	Rp	xxx		
Pendapatan Usaha			Rp	xxx
Kas/Bank	Rp	xxx		
Pendapatan Usaha			Rp	xxx
PPN			Rp	xxx

- Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggan tidak bisa membayar sisa pembayarannya dengan tepat waktu, maka pencatatannya ialah sebagai berikut:

Penerimaan Uang Muka Langgan	Rp	xxx		
Pendapatan usaha			Rp	xxx
Piutang Usaha	Rp	xxx		
Pendapatan Usaha			Rp	xxx
PPN Keluaran			Rp	xxx

Dikarenakan PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya sudah menggunakan sistem *e-faktur*, maka PPN Keluaran akan langsung dibayarkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya sebelum batas akhir pembayaran PPN Keluaran, meskipun uang belum diterima oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) dari pelanggan. Namun nanti ketika pelanggan sudah membayar, uang sepenuhnya akan masuk ke

dalam kas PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya. Adapun pencatatannya sebagai berikut:

- Ketika pembayaran PPN atas jasa oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya sebagai pemungut yang dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak:

PPN Keluaran	Rp	xxx	
Kas			Rp xxx

- Serta pencatatan yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya ketika pelanggan melunasi piutangnya:

Kas	Rp	xxx	
Piutang Usaha			Rp xxx

2.2.3 Pengakuan Pendapatan pada Perusahaan

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dari penjualan jasa pada PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya secara umum menggunakan metode akrual basis yang berarti perusahaan sudah mengakui pendapatan pada saat terjadinya transaksi meskipun kenyataannya pendapatan belum diterima secara tunai sepenuhnya. Serta prinsipnya mengacu pada prinsip terealisasi atau dapat direalisasi, artinya perusahaan akan segera mengakui pendapatan jika jumlah pendapatan tersebut telah direalisasi atau pasti akan direalisasi.

Pengakuan terjadinya transaksi penjualan adalah pada saat adanya pembayaran atas pekerjaan jasa yang dibagi dalam beberapa tahap.

1. Pengakuan pendapatan saat pembayaran tahap I

Tahap ini merupakan dimana klien diminta untuk membayar *Down Payment (DP)* sebesar 50% dari kontrak yang telah disepakati.

Pada saat itu bagian akuntansi mencatat jurnal sebagai berikut:

Kas/Bank	Rp xxx	
Penerimaan Uang Muka Langgan		Rp xxx

2. Pengakuan pendapatan saat pembayaran tahap II

Tahap ini muncul jika pekerjaan jasa telah selesai dilakukan sepenuhnya, serta *invoice* telah diterbitkan dan ditagihkan ke klien. Adapun pencatatan 50% dari sisa pembayarannya beserta PPN adalah sebagai berikut:

Penerimaan Uang Muka Langganan	Rp xxx	
Pendapatan Usaha		Rp xxx
Kas/Bank	Rp xxx	
Pendapatan usaha		Rp xxx
PPN Keluaran		Rp xxx

- *Pada saat pembayaran tahap kedua* (ketika pelanggan mampu membayar tunai sisa pembayarannya):

Penerimaan Uang Muka Langganan	Rp xxx	
Pendapatan Usaha		Rp xxx
Kas/Bank	Rp xxx	
Pendapatan Usaha		Rp xxx
PPN		Rp xxx

- Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggan tidak bisa membayar sisa pembayarannya dengan tepat waktu, maka pencatatannya ialah sebagai berikut:

Penerimaan Uang Muka Langganan	Rp xxx	
Pendapatan usaha		Rp xxx
Piutang Usaha	Rp xxx	
Pendapatan Usaha		Rp xxx
PPN Keluaran		Rp xxx

Dikarenakan PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya sudah menggunakan sistem *e-faktur*, maka PPN Keluaran akan langsung dibayarkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya sebelum batas akhir pembayaran PPN Keluaran, yakni maksimal tanggal 7 di bulan berikutnya, meskipun uang belum diterima oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) dari pelanggan. Namun nanti ketika pelanggan sudah membayar, uang sepenuhnya akan masuk ke dalam kas PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya. Adapun pencatatannya sebagai berikut:

- Ketika pembayaran PPN atas jasa oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya sebagai pemungut yang dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak:

PPN Keluaran	Rp	xxx	
Kas			Rp xxx

- Serta pencatatan yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia (Cabang Surabaya) ketika pelanggan melunasi piutangnya:

Kas	Rp	xxx	
Piutang Usaha			Rp xxx

Jadi perusahaan hanya bisa mengerjakan pekerjaan apabila klien telah membayar setengah dari nilai kontrak yang telah disepakati. Jika klien tidak sanggup untuk membayar *Down Payment* maka PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya tidak dapat mengerjakan pekerjaan jasa yang diminta oleh klien. Serta perlakuan atas perpajakannya, PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya selaku pemungut, sudah menggunakan sistem *e-faktur*, maka perusahaan akan langsung membayarkan PPN Keluaran pelanggan sebelum batas akhir pembayaran PPN, serta ketika *invoice* ditagihkan ke pelanggan, bukti potong faktur pajak juga turut disertakan.

2.2.4 Pengukuran Terhadap Pendapatan

Pendapatan diukur sebesar nilai wajar imbalan yang diterima oleh perusahaan atau yang dapat diterima. Pengukuran jasa pada PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya didasarkan pada beban operasional yang dikeluarkan untuk memperoleh harga pokok jasa tersebut. Adapun beban-bebannya seperti Beban Personil yaitu beban yang dikeluarkan untuk membayar surveyor atau inspektor yang ditugaskan; Beban Perjalanan Dinas merupakan akomodasi yang dikeluarkan selama surveyor atau inspektor bertugas; Beban Fasilitas Kerja seperti fasilitas apa saja yang akan dibutuhkan oleh surveyor atau inspektor selama menjalankan tugas; dan lainnya. Perkiraan-perkiraan beban tersebut telah diestimasi dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, sehingga sebelum perusahaan menentukan berapa tarif yang harus dibayarkan oleh klien, perusahaan sudah memastikan bahwa estimasi pendapatan yang akan diterima telah handal dan tidak merugikan perusahaan.

Dalam hal pengukuran pendapatan dilakukan berdasarkan jumlah uang yang akan diterima oleh perusahaan. PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya dalam mengukur pendapatannya telah sesuai dengan standar keuangan dan mengharuskan perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan nilai rupiah. Apabila transaksi yang terjadi menggunakan mata uang asing, maka akan disesuaikan dengan kurs pajak yang berlaku.

2.2.5 Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan

Pendapatan usaha disajikan pada pos pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diungkap yaitu (1) pendapatan usaha seharusnya dirinci dan disajikan terpisah setiap pos berdasar strukturnya, (2) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan.

2.3 Pembahasan

2.3.1 Ilustrasi Jurnal Pendapatan PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya

a. Ilustrasi Jurnal Pendapatan Operasional

PT Surveyor Indonesia mendapatkan pekerjaan jasa Survei untuk melakukan studi Optimasilasi Potensi Wilayah Pada Kabupaten B dengan nilai kontrak sebesar Rp 500.000.000. Perjanjian kontrak dilakukan pada tanggal 20 Juni 2016 disertai pembayaran tahap I sebesar Rp 250.000.000, dimana nilai tersebut didapat dari 50% dari nilai kontrak. Serta disebutkan bahwa lamanya pekerjaan adalah 4 bulan dan diperkirakan akan selesai pada tanggal 19 Oktober 2016 Maka pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai berikut:

- Pencatatan pada saat perusahaan menerima pembayaran tahap I sebesar 50% dari perjanjian kontrak, dengan nominal Rp 500.000.000.

Tgl	Deskripsi	Debit	Kredit
20/06/20	Kas/Bank	Rp 250.000.000	
16	Penerimaan Uang Muka Langgan		Rp 250.000.000

- Pencatatan pada saat perusahaan telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak yang ditetapkan dan menerima sisa pembayarannya sebesar Rp 250.000.000 ditambah PPN 10% serta jurnal pembalik pengakuan pendapatan pada pembayaran awal.

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
19/10/20	Penerimaan Uang Muka Langganan	Rp 250.000.000	
16	Pendapatan Usaha		Rp 250.000.000
	Kas/Bank	Rp 300.000.000	
	Pendapatan Usaha		Rp 250.000.000
	PPN Keluaran		Rp 50.000.000

- Jika pekerjaan telah selesai 100%, *invoice* telah diterbitkan dan telah ditagihkan ke klien namun klien belum sanggup melakukan pembayaran tahap ke II, perusahaan akan menilai besar tidaknya kemungkinan pembayaran yang dapat direalisasikan. Jika memang kemungkinan terealisasinya tinggi, perusahaan akan mengakui pendapatan yang seharusnya diterima tersebut sebagai piutang, jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
19/10/20	Penerimaan Uang Muka Langganan	Rp 250.000.000	
16	Pendapatan Usaha		Rp 250.000.000
	Piutang Usaha	Rp 300.000.000	
	Pendapatan Usaha		Rp 250.000.000
	PPN Keluaran		Rp 50.000.000

- Perusahaan akan membayarkan PPN Keluaran pelanggan sebelum batas akhir pembayaran PPN meskipun pelanggan belum mampu untuk memenuhi kewajibannya, mengingat PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya selaku pemungut. pencatatannya sebagai berikut:

Tgl	Deskripsi	Debit	Kredit
31/10/20	PPN Keluaran	Rp 50.000.000	
16	Kas		Rp 50.000.000

- Pada 30 November 2016, Pelanggan mampu untuk memenuhi semua kewajibannya, maka pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan ialah:

Tgl	Deskripsi	Debit	Kredit
30/11/16	Kas	Rp 300.000.000	
	Piutang Usaha		Rp 300.000.000

b. Ilustrasi Jurnal Pendapatan Non Operasional

PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya memiliki rekening koran di Bank BRI. Pada 31 Desember 2016, Bank BRI memberikan bunga sebesar Rp 500.000 dan mengenakan beban administrasi bank sebesar Rp 10.000 maka jurnal yang dicatat oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya sebagai berikut:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
31/12/2016	Kas/Bank	Rp 490.000	
	Beban Umum	Rp 10.000	
	Pendapatan lain-lain		Rp 500.000

2.3.2 Analisa Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan pada PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya

Pendapatan usaha jasa pada PT Surveyor Indonesia Cabang Surabaya diakui dengan metode *accrual basis*. Pada saat pembayaran *Down Payment*, perusahaan mencatat kas masuk sebagai penerimaan uang muka langganan dimana merupakan bagian dari kewajiban dalam neraca, bukan sebagai pendapatan yang merupakan bagian dalam laporan laba rugi. Perusahaan dapat mengakui penerimaan uang muka langganan tersebut sebagai pendapatan ketika pekerjaan telah 100% dikerjakan. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK no. 23 Tahun 2015, paragraf 24:

“Tingkat penyelesaian suatu transaksi dapat ditentukan dengan berbagai metode. Suatu perusahaan menggunakan metode yang dapat mengukur dengan andal jasa yang diberikan. Tergantung pada sifat transaksi, metode tersebut meliputi:

- (a) Survei pekerjaan telah dilaksanakan;
- (b) Jasa yang dilakukan hingga pada tanggal tertentu sebagai presentase dari total jasa yang dilakukan;
- (c) Proporsi biaya yang terjadi hingga tanggal tertentu dibagi estimasi total biaya transaksi tersebut. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang dilaksanakan hingga tanggal tertentu dimasukkan dalam biaya yang terjadi hingga tanggal tersebut. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang dilakukan, atau harus dilakukan dimasukkan kedalam estimasi total biaya transaksi tersebut.”

Seharusnya pendapatan operasional perusahaan yang berasal dari penjualan jasa dicatat pada saat pembayaran atas jasa pekerjaan jasa tersebut dan menggunakan metode presentase penyelesaian atau garis lurus sesuai dengan lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan jasa untuk mengakui pendapatan. Perusahaan seharusnya menggunakan waktu berjalan sebagai presentase dari pendapatan yang diakui sesuai dengan PSAK No. 23 Tahun 2015, paragraf 25 yang menegaskan:

“ Untuk tujuan praktis, bila jasa dihasilkan oleh sejumlah kegiatan yang tidak dapat ditentukan selama suatu periode tertentu, pendapatan diakui atas dasar garis lurus selama periode tertentu kecuali jika ada bukti bahwa ada metode lain yang lebih baik yang dapat mencerminkan tingkat penyelesaian. Bila kegiatan tertentu jauh lebih signifikan daripada kegiatan yang lain, pengakuan pendapatan ditunda sampai kegiatan signifikan tersebut dilakukan.”

Perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu pembayaran tahap pertama sebesar 50% dari total waktu yang diperkirakan selama 4 bulan. Serta karena perusahaan telah mengakui pendapatannya, maka perusahaan juga harus mengakui PPN atas pendapatan tersebut. Jadi pendapatan dan PPN atas pendapatan yang diakui dalam satu bulan berikutnya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp } 250.000.000}{50\% \times 4} = \text{Rp } 125.000.0000$$

Serta untuk PPN keluaran yang diakui tiap bulannya sesuai dengan pendapatan yang diakui, yaitu sebesar 10% dari pendapatan yang diakui:
 $10\% \times \text{Rp } 125.000.000 = \text{Rp } 12.500.000.$

Sehingga pencatatan penerimaan uang muka serta pengakuan pendapatan dari bulan ke bulan sebagai berikut:

- jurnal untuk pencatatan penerimaan uang muka :

Tgl	Deskripsi	Debit	Kredit
20/06/20 16	Kas	Rp 275.000.000	
	Penerimaan Uang Muka Langganan		Rp 250.000.000
	PPN Keluaran		Rp 25.000.000

- Jurnal untuk pengakuan dari bulan ke bulan :

Tgl	Deskripsi	Debit	Kredit
31/07/20 16	Penerimaan Uang Muka Langganan	Rp 125.000.000	
	Pendapatan Usaha		Rp 125.000.000

Tgl	Deskripsi	Debit	Kredit
31/07/20 16	PPN Keluaran	Rp 12.500.000	
	Kas		Rp 12.500.000

Tgl	Deskripsi	Debit	Kredit
31/08/20 16	Penerimaan Uang Muka Langganan	Rp 125.000.000	
	Pendapatan Usaha		Rp 125.000.000

Tgl	Deskripsi	Debit	Kredit
31/08/20	PPN Keluaran	Rp 12.500.000	
16	Kas		Rp 12.500.000

Jadi seharusnya, pembayaran tahap pertama akan diakui sebagai pendapatan seluruhnya pada bulan ke 2 dari pekerjaan jasa tersebut. Sedangkan untuk bulan ke 3 dan 4 yang jatuh pada bulan September dan Oktober 2016 seharusnya perusahaan juga mencatat pendapatan jasa dari pekerjaan jasa yang telah dilakukan, walaupun pembayaran dari tahap II belum terpenuhi. Adapun pencatatan yang harus dicatat pada bulan September maupun Oktober 2016 adalah sebagai berikut:

Tgl	Deskripsi	Debit	Kredit
31/09/20	Pendapatan akan Diterima	Rp 175.500.000	
16	Pendapatan Usaha		Rp 125.000.000
	PPN Keluaran		Rp 12.500.000

Dikarenakan PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya merupakan pemungut, maka PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya wajib melaporkan dan membayarkan PPN Keluaran pelanggan meskipun pelanggan belum memenuhi kewajibannya, mengingat terbatasnya waktu untuk pelaporan pajak, maka PPN Keluaran pelanggan dapat dibayarkan sebelum tanggal 7 di bulan berikutnya, jika tidak, maka perusahaan yang akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2%. Adapun pencatatan PPN Keluaran pelanggan untuk bulan September dan Oktober yang dibayarkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero Cabang Surabaya) ialah:

Tgl	Deskripsi	Debit	Kredit
31/09/20	PPN Keluaran	Rp 12.500.000	
16	Kas		Rp 12.500.000

Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2016, diilustrasikan klien mampu untuk memenuhi pembayarannya, maka pencatatannya adalah :

Tgl	Deskripsi	Debit	Kredit
31/10/20	Kas	Rp 262.500.000	
16	Pendapatan akan Diterima		Rp 250.000.000
	PPN Keluaran		Rp 12.500.000

Tgl	Deskripsi	Debit	Kredit
31/10/20	PPN Keluaran	Rp 12.500.000	
16	Kas		Rp 12.500.000

Kemudian untuk pengakuan pendapatan non operasional perusahaan yang didapat dari pendapatn bunga atas jasa giro bank, PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya mengakuinya dengan meode *cash basis*. Perusahaan langsung mengakuinya sebagai pendapatan dan dimasukkan kedalam kas ketika uang telah diterima oleh perusahaan.

2.3.3 Analisa Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan

Penyajian pendapatan pada laporan laba rugi komprehensif PT Surveyor Indoensia (Persero) Cabang Surabaya telah sesuai dengan PSAK No. 23 Tahun 2015. Pendapatan operasional dan non operasional telah disajikan secara terpisah. Serta pendapatan pada perusahaan disajikan dengan jumlah bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang mengurangnya.

Pengungkapan pendapatan pada PT Surveyor Indonesia (Pesero) Cabang Surabaya telah sesuai dengan PSAK No. 23 Tahun 2015 karena kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengakui pendapatan telah diungkap oleh perusahaan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan penyelesaian transaksi penjualan jasa.

2.3.4 Ringkasan Permasalahan Akuntansi yang terjadi pada PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya

No	Permasalahan	Implementasi	Solusi
1.	Kapan Pendapatan diakui oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya?	Pendapatan diakui oleh perusahaan saat pekerjaan jasa telah selesai dikerjakan 100%. Hal ini mengakibatkan pengakuan laba tidak tepat.	Perusahaan seharusnya mengakui pendapatan menggunakan metode presentase penyelesaian sesuai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan agar laba yang disajikan pada laporan laba rugi menjadi tepat dan efektif.
2.	Dasar apakah yang digunakan untuk mengakui pendapatan?	Untuk pendapatan operasional, perusahaan mengakuinya menggunakan <i>accrual basis</i> . Lalu untuk pendapatan non operasionalnya, perusahaan mengakuinya menggunakan <i>cash basis</i> .	PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya dapat mempertahankan implementasi yang sudah dijalankan oleh perusahaan khususnya dalam dasar untuk mengakui pendapatannya.
3.	Bagaimanakah perlakuan akuntansi atas pelaporan dan pengungkapan pendapatan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya?	Perlakuan akuntansi atas pelaporan dan pengungkapan PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 23 Tahun 2015serta di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan tidak	PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya seharusnya menggunakan dasar PSAK dalam menyusun Laporan Keuangan khususnya PSAK No. 23 tentang pendapatan. Serta

	Surabaya?	disebutkan menggunakan PSAK No berapa serta tahun efektif berapa.	diharapkan mengubah metode dalam mengakui pendapatannya agar sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 23 tahun 2015. Dan diharapkan kedepannya PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya lebih mengikuti perkembangan perubahan PSAK khususnya PSAK No. 23.
--	-----------	-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 2.3 Ringkasan Permasalahan Akuntansi pada Perusahaan

Ringkasan permasalahan akuntansi pada tabel 2.3 menjelaskan bahwa PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya, khususnya dalam hal pengakuan, pengukuran, pelaporan serta penyajian atas pendapatannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.23 Tahun 2015. Hal ini disebabkan karena kesalahan dalam menggunakan metode dalam mengakui pendapatannya. Pendapatan diakui oleh perusahaan saat pekerjaan jasa telah selesai dikerjakan 100%. Artinya, pendapatan belum akan dilaporkan sampai tingkat pekerjaan terselesaikan, meskipun pekerjaan yang dilakukan ada pada beberapa periode akuntansi. Sehingga tidak dapat memberi gambaran yang bisa mewakili kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini mengakibatkan pengakuan laba tidak tepat dan mengakibatkan kesalahan informasi keuangan yang dihasilkan. Seharusnya perusahaan mengakui pendapatannya menggunakan metode presentase penyelesaian sesuai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan. Penggunaan metode persentase penyelesaian berkaitan dengan kemampuan untuk membuat perkiraan penyelesaian yang cukup

akurat dan keuntungan akhir tahun. Pendapatan diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses pekerjaan yang telah dikerjakan, yaitu persentase penyelesaian. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat penyelesaian kegiatan jasa dan kinerja dalam suatu periode. Sehingga laba yang disajikan pada laporan laba rugi menjadi tepat dan efektif, serta informasi keuangan yang dihasilkan lebih akurat.

Dasar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dalam mengakui pendapatan operasionalnya ialah menggunakan *accrual basis*, adapun keuntungan dalam menerapkan basis ini yaitu pendapatan dan beban diakui saat terjadi transaksi sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya, meskipun kas belum diterima sepenuhnya. Namun setiap kelebihan selalu ada kekurangan dibaliknya, seperti halnya *accrual basis* ini juga memiliki kekurangan yakni adanya resiko pendapatan tak tertagih, dimana nantinya akan mengurangi pendapatan yang semestinya diterima oleh perusahaan, serta perusahaan tidak dapat memperkirakan kapan piutang usaha perusahaan dapat direalisasikan dalam bentuk kas atau setara kas. Kemudian untuk pendapatan non operasionalnya, perusahaan mengakui pendapatannya menggunakan *cash basis*, dimana perusahaan hanya mengakui kas dan beban saat kas telah diterima oleh perusahaan. Hal ini dapat mencerminkan posisi yang sebenarnya serta beban umum yang dikeluarkan belum diakui sampai diterimanya kas.

Perlakuan akuntansi atas pengakuan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 23 Tahun 2015. Hal ini diakibatkan karena perusahaan tidak menggunakan dasar PSAK No. 23 dalam mengakui pendapatannya, serta di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan tidak disebutkan menggunakan PSAK No berapa serta tahun efektif berapa. Solusi yang dapat penulis berikan yakni perusahaan seharusnya

menggunakan dasar PSAK dalam menyusun Laporan Keuangan khususnya PSAK No. 23 tentang pendapatan. Serta diharapkan mengubah metode dalam mengakui pendapatannya dari metode kontrak selesai menjadi metode presentase penyelesaian dengan menggunakan garis lurus agar laba yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diukur dengan akurat dan handal sehingga tercipta keselarasan antara kebijakan perusahaan dengan PSAK No. 23. Dan diharapkan kedepannya PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya lebih mengikuti perkembangan perubahan PSAK khususnya PSAK No. 23.

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas pengakuan pendapatan di perusahaan tersebut sebagai berikut.

1. PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya menggunakan *accrual basis* untuk mengakui pendapatan operasionalnya. Pembayaran atas pendapatan operasionalnya dibagi dalam beberapa tahap, dan untuk PPN atas pendapatan yang diakui tersebut ditagih pada pembayaran tahap akhir. Kemudian untuk mengakui pendapatan non operasionalnya, perusahaan menggunakan *cash basis*.
2. PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya menggunakan metode kontrak selesai dalam mengakui pendapatannya, yaitu pendapatan diakui oleh perusahaan saat pekerjaan jasa telah selesai dikerjakan 100% dan tidak menggunakan metode presentase penyelesaian sesuai dengan lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan jasa untuk mengakui pendapatan. Hal ini mengakibatkan pengakuan laba tidak tepat dan mengakibatkan kesalahan informasi keuangan yang dihasilkan.
3. Pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan pendapatan pada PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 23 Tahun 2015, serta di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Surveyor Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 (lampiran 1) tidak dijelaskan bahwa untuk pengakuan, pengukuran, pelaporan dan penyajian pendapatannya menggunakan PSAK nomor berapa serta tahun efektif berapa.

3.2 Saran

Penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberi manfaat di masa yang akan datang untuk PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan seharusnya menggunakan metode presentase penyelesaian dengan dasar garis lurus sesuai waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan dalam mengakui pendapatannya. Dengan tepatnya pengakuan waktu pengakuan pendapatan, maka laba yang dilaporkan pada laporan laba rugi menjadi akurat dan efektif untuk digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan.
2. Perusahaan seharusnya menggunakan dasar PSAK dalam menyusun Laporan Keuangan khususnya PSAK No. 23 tentang pendapatan. Serta diharapkan mengubah metode dalam mengakui pendapatannya dari metode kontrak selesai menjadi metode presentase penyelesaian dengan menggunakan garis lurus agar laba yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diukur dengan akurat dan handal sehingga tercipta keselarasan antara kebijakan perusahaan dengan PSAK No. 23. Dan diharapkan kedepannya PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya lebih mengikuti perkembangan perubahan PSAK khususnya PSAK No. 23.

Daftar Pustaka

Buku Pedoman Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Universitas Airlangga

Buku Pedoman PT Surveyor Indonesia (Persero)

Ikatan Akuntansi Indonesia. Revisi 2015. Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan Pendapatan. Jakarta: Salemba Empat.

Kieso, Donald E., Jerry Weyandt dan Terry D. Warfield. 2014. Intermediate

Accounting IFRS Edition. United States: John Wiley & Sons.

Warren, Carl S., James M. Reeve dan Jhonathan E. Duhac, dkk. Accounting

Indonesia Adaption 25th Edition. 2014. Jakarta: Salemba Empat.

Website PT Surveyor Indonesia (Persero): <http://www.ptsi.co.id/>, diakses tanggal 1 Maret 2018.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Catatan Atas Laporan Keuangan PT Surveyor Indonesia (Persero)

p. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan jasa diakui berdasarkan tahapan penyesuaian pekerjaan telah selesai dilaksanakan atau pada saat tagihan (dan/atau bentuk lain yang dapat ditagihkan) diterbitkan.

Pada akhir periode, atas tahapan jasa yang telah selesai diserahkan ataupun berdasarkan berita acara tahapan penyelesaian pekerjaan yang diterima oleh pemberi kerja namun belum dapat ditagihkan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, dengan tujuan agar pengukuran kinerja proyek di cabang / Divisi Bisnis menjadi lebih wajar, maka dapat diakui pendapatannya sebesar Pro-forma Invoice dan dicatat ke dalam akun pendapatan akan diterima.

Sedangkan beban diakui pada saat terjadinya kenaikan liabilitas atau penurunan aset yang diakibatkan dari penyerahan suatu produk, pelaksanaan suatu jasa atau pelaksanaan aktivitas lain Perusahaan untuk kelangsungan operasi Perusahaan.

p. Revenue and expense recognition

Revenue from services is recognized based on the stage of adjustment work has been completed or when the invoice (and/or other forms that can be charged) was published.

At the end of the period, on the stages of the services that have been completed submitted or by the minutes of the stage of completion of work received by the employer but can not be charged in accordance with the agreements and conditions stipulated in the contract, with the aim of measuring the performance of the project in a branch/business division become more reasonable, it can be recognized revenues of pro-forma invoice and recorded into revenue account will be accepted.

Meanwhile the expenses are recognized when the increase in liabilities or decrease in assets resulting from the delivery of a product, the implementation of a service or the execution of other activities of the Company for the continuity of operations of the Company.

Lampiran 2 : Laporan Keuangan PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya


LAPORAN KEUANGAN				
PT SURVEYOR INDONESIA CABANG SURABAYA				
2015-2016				
Description	2015		2016	
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas	Rp	9.597.341.447	Rp	3.530.807.088
Investasi Jangka Pendek	Rp	-	Rp	-
Piutang Wesel	Rp	-	Rp	-
Piutang Usaha	Rp	21.442.375.611	Rp	15.891.729.987
Penyisihan Piutang Usaha	Rp	(3.168.779.517)	Rp	(3.179.661.321)
Piutang Usaha (Net)	Rp	18.273.596.095	Rp	12.712.068.667
Piutang Lain-Lain	Rp	7.136.438.124	Rp	5.746.928.674
Penyisihan Piutang Lain-lain	Rp	-	Rp	-
Piutang Lain-Lain	Rp	7.136.438.124	Rp	5.746.928.674
Uang Muka	Rp	718.595.660	Rp	1.925.053.755
Pajak Dibayar di Muka	Rp	1.059.072.324	Rp	654.144.532
Biaya Dibayar di Muka	Rp	296.054.809	Rp	2.016.081.368
Pendapatan akan Diterima	Rp	1.027.000.000	Rp	2.829.330.950
Total Aset Lancar	Rp	38.108.098.459	Rp	29.414.415.035
Investasi Jangka Panjang				
IJP - S. Berharga Tersedia untuk Dijual	Rp	-	Rp	-
IJP-Obligasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Rp	-	Rp	-
Inv. Saham Jk. Panjang >=20% dan <=50%	Rp	-	Rp	-
Investasi Kerjasama Operasi	Rp	-	Rp	-
Total Investasi Jangka Panjang	Rp	-	Rp	-
Aktiva Tetap				
Biaya Perolehan Aktiva Tetap	Rp	3.713.397.356	Rp	3.804.501.356
-/- Ak. Penyusutan Aktiva Tetap	Rp	(2.947.208.343)	Rp	(3.189.737.903)
Nilai Tercatat Aktiva Tetap	Rp	766.189.013	Rp	614.763.453
B. Perolehan AT. Sewa Guna Usaha	Rp	-	Rp	-
-/- Ak. Peny. AT. Sewa Guna Usaha	Rp	-	Rp	-
Nilai Tercatat AT. Sewa Guna Usaha	Rp	-	Rp	-
Biaya Perolehan Aktiva Tetap - Afkir	Rp	-	Rp	-
-/- Ak. Penyusutan Aktiva Tetap Afkir	Rp	-	Rp	-
Nilai Tercatat Aktiva Tetap Afkir	Rp	-	Rp	-
Total Nilai Tercatat Aktiva Tetap	Rp	766.189.013	Rp	614.763.453
Aktiva Tak Berwujud				
Biaya Perolehan Aktiva Tak Berwujud	Rp	-	Rp	-
-/- Ak. Amortisasi Aktiva Tak Berwujud	Rp	-	Rp	-
Total Nilai Tercatat Ak.Tak Berwujud	Rp	-	Rp	-
Aktiva Lain-lain				
Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian	Rp	-	Rp	-
Aktiva Tetap Tidak Dipergunakan	Rp	-	Rp	-
Piutang Lain-Lain > 1 thn	Rp	-	Rp	-
Penyisihan Piutang Lain-lain	Rp	-	Rp	-
Piutang Lain-lain > 1 thn (Net)	Rp	-	Rp	-
Biaya yang Ditangguhkan	Rp	1.320.552.540	Rp	1.320.552.540
-/- Amortisasi Deff-Charges	Rp	(1.320.552.540)	Rp	(1.320.552.540)
Biaya yang Ditangguhkan (Net)	Rp	0	Rp	0
Aktiva Pajak yang Ditangguhkan	Rp	-	Rp	-
Uang Jaminan	Rp	60.000.000	Rp	139.406.175
Total Aktiva Lain-lain	Rp	60.000.001	Rp	139.406.176
Hubungan Rekening Koran	Rp	(11.408.532.059)	Rp	(3.845.281.939)
TOTAL ASET	Rp	27.525.755.414	Rp	26.323.302.723

KEWAJIBAN & EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Hutang Bank Jangka Pendek	Rp	-	Rp -
Hutang Bank J. Tempo Satu Tahun	Rp	-	Rp -
Hutang SGU J. Tempo Satu Tahun	Rp	-	Rp -
Hutang Obl/SB Lain Jt.Tempo 1 Tahun	Rp	-	Rp -
Hutang Wesel	Rp	-	Rp -
Hutang Usaha	Rp	(2.643.904.462)	Rp (4.424.898)
Hutang Pajak	Rp	1.553.895.142	Rp 1.840.815.059
Hutang Afiliasi	Rp	-	Rp -
Hutang Lain-Lain	Rp	16.014.960	Rp -
Biaya yang Masih Harus Dibayar	Rp	(1.744.881.507)	Rp (483.519.603)
Penerimaan Uang Muka Langganan	Rp	(431.240.474)	Rp (274.453.575)
Total Kewajiban Jangka Pendek	Rp	(3.250.116.341)	Rp 1.078.416.983
Kewajiban Jangka Panjang			
Hutang Bank Jangka Panjang	Rp	-	Rp -
Hutang SGU Jangka Panjang	Rp	-	Rp -
Hutang Obligasi/SB Lain-Jk. Panjang	Rp	-	Rp -
Hutang Afiliasi Tidak Lancar	Rp	-	Rp -
Kewajiban Pajak Ditangguhkan	Rp	-	Rp -
Cadangan Imbalan Kerja	Rp	-	Rp -
Total Kewajiban Jk.Panjang	Rp	-	Rp -
TOTAL KEWAJIBAN	Rp	(3.250.116.341)	Rp 1.078.416.983
EKUITAS			
Modal Saham	Rp	-	Rp -
Modal Disetor	Rp	-	Rp -
Tambahkan Modal Disetor (Agio/Disagio)	Rp	-	Rp -
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	Rp	-	Rp -
Laba Rugi Investasi Belum Direalisasi	Rp	-	Rp -
Total Modal Saham	Rp	-	Rp -
Saldo Laba			
Saldo Laba-Umum	Rp	-	Rp -
Saldo Laba-Bertujuan	Rp	-	Rp -
Saldo Laba-Tahun Lalu	Rp	(19.245.045.325)	Rp (24.275.639.073)
Saldo Laba- Tahun Lalu Antar Cabang	Rp	-	Rp -
Saldo Laba Berjalan	Rp	(5.030.593.747)	Rp (3.126.080.634)
Total Saldo Laba	Rp	(24.275.639.073)	Rp (27.401.719.707)
TOTAL EKUITAS	Rp	(24.275.639.073)	Rp (27.401.719.707)
TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS	Rp	(27.525.755.414)	Rp (26.323.302.723)

Lampiran 3 : Laporan Laba Rugi PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya

LAPORAN LABA RUGI PT SURVEYOR INDONESIA CABANG SURABAYA 2016				
Description		2015		2016
PENDAPATAN USAHA	Rp	44.969.917.283	Rp	39.603.644.320
BEBAN JASA				
Beban Personil	Rp	15.498.218.410	Rp	14.402.064.977
Beban Perjalanan Dinas	Rp	2.238.381.908	Rp	1.589.165.280
Beban Perlengkapan Kerja dan Pelaporan	Rp	3.690.645.154	Rp	3.783.862.630
Beban Kerjasama/Jasa dari Pihak Ketiga	Rp	6.074.817.268	Rp	4.050.562.821
Beban Fasilitas Kerja	Rp	3.411.575.423	Rp	3.712.122.203
Beban Persiapan Pekerjaan Proyek	Rp	2.066.500.768	Rp	2.111.293.327
TOTAL BEBAN JASA	Rp	(32.980.138.931)	Rp	(29.649.071.238)
LABA/(RUGI) OPERASI	Rp	11.989.778.352	Rp	9.954.573.082
BEBAN PEMASARAN, UMUM, & ADM.				
Beban Personil	Rp	3.486.429.684	Rp	2.909.404.573
Beban Pendidikan, Penarikan dan Kesej. Personil	Rp	579.657.595	Rp	497.735.994
Beban Perjalanan Dinas	Rp	126.408.878	Rp	81.136.434
Beban Perlengkapan Kerja	Rp	273.770.297	Rp	220.632.780
Beban Kerjasama/Jasa dari Pihak Ketiga	Rp	1.550.454.390	Rp	1.241.734.811
Beban Fasilitas Kerja	Rp	1.037.262.777	Rp	1.460.233.088
Beban Pemasaran	Rp	39.888.703	Rp	11.290.510
Beban Penelitian dan Pengembangan	Rp	-	Rp	-
Beban Umum	Rp	491.077.282	Rp	355.287.786
TOTAL BEBAN PEMASARAN, UMUM, & ADM	Rp	(7.584.949.605)	Rp	(6.777.455.976)
LABA/(RUGI) USAHA	Rp	4.404.828.747	Rp	3.177.117.106
PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN-LAIN				
Penghasilan Lain-Lain	Rp	868.144.121	Rp	333.270.556
Beban Lain-Lain	Rp	(242.379.121)	Rp	(384.307.029)
TOTAL PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN-LAIN		625.765.000,47	Rp	(51.036.472)
LABA/(RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK	Rp	5.030.593.747	Rp	3.126.080.634
	Rp	-	Rp	-
PAJAK PENGHASILAN	Rp	-	Rp	-
PPh Badan	Rp	-	Rp	-
PPh Tangguhan	Rp	-	Rp	-
TOTAL PAJAK PENGHASILAN	Rp	-	Rp	-
	Rp	-	Rp	-
LABA/(RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	Rp	5.030.593.747	Rp	3.126.080.634

Lampiran 4 : Bukti Tanda Terima

 **SURVEYOR INDONESIA (SURABAYA)**
Jl. Comal No. 7 - 9 Surabaya 60295, INDONESIA
Phone : (031) 568 1750 Fax. (031) 568 1749

N^o 000718

**TANDA TERIMA
RECEIPT**


Nomor : 001 / SISUB / I / 2018
Number

Sudah Terima Dari : CU SUMBER ALAM
Received From

Banyaknya Uang : Rp 2.475.000
The Sum Of

Untuk Pembayaran : ANALISA SARANG BURUNG WALET
In Payment Of

Terbilang : DUA RUA EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH
Says

Surabaya, 15 JANUARI 2018

YUSUPA

Lampiran 5: Kartu Konsultasi Tugas Akhir dan Praktik Kerja Lapangan

KARTU KONSULTASI PKL (PRAKTEK KERJA LAPANGAN)
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

1. Nama Mahasiswa : Adien Yunita Maheswari

2. Nomor Pokok :

3. Jurusan : D3 Akuntansi

4. Topik PKL : Akuntansi Keuangan

5. Judul PKL : Perilaku Akuntansi atas Pendapatan Jasa Berdasarkan PSAK 23 Tahun 2015 di pada PT Surveyor Indonesia (Cabang Surabaya)

6. Lokasi PKL : PT Surveyor Indonesia (Persen) Cabang Surabaya

7. Tanggal Mengajukan PKL :

8. Selesai Menulis PKL tanggal :

9. Pembimbing : Iman Harymawan SE, M.B.A., Ph.D

10. Keterangan :

CATATAN KONSULTASI			
BULAN	Tanggal	Parap Pembimbing	KETERANGAN
JANUARI	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
FEBRUARI	1.		
	2.		
	3.		
	4. 21 Feb 2018	lmr	Pertemuan dan Pembahasan Topik
MARET	1. 1 Maret 2018	lmr	Pengumpulan Latar Belakang & Penjelasan Judul
	2. 5 Maret 2018	lmr	Pengumpulan Gambaran Umum Perusahaan
	3. 12 Maret 2018	lmr	Pengumpulan Landasan Teori
	4.		
APRIL	1. 10 April 2018	lmr	Pengumpulan Lap. Pkt dan Bab 1-2 Tugas Akhir
	2.		
	3.		
	4.		
MEI	1. 21 Mei 2018	lmr	Konsultasi Bab 2 dan Bab 3
	2. 22 Mei 2018	lmr	Konsultasi Revisi bab 2 dan bab 3
	3. 23 Mei 2018	lmr	Tanda tangan Lembar Pengorahan
	4.		
JUNI	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
JULI	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
AGUSTUS	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
SEPTEMBER	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
OKTOBER	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
NOPEMBER	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	1.		
	2.		